

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah swt. kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia.¹

Allah swt. berfirman pada Q.S Al-Maidah ayat 3, sebagai berikut:



“... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu...”²

Maksud dari Q.S Al-Maidah: 3 bahwa ini merupakan nikmat Allah terbesar yang diberikan kepada umat ini, tatkala Allah menyempurnakan agama

¹Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management: Manajemen perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013) h.493

² Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta:Maghfirah Pustaka,2006), h.107

mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama yang lain dan tidak pula Nabi lain selain Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad saw.³

Wujud dari kesempurnaan ajaran Islam tersebut antara lain: Islam tidak hanya mengatur masalah hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah). Akan tetapi Islam juga mengatur dan menyelesaikan permasalahan hubungan manusia dengan dirinya sendiri.

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.⁴

Banyak ayat al-Qur'an dan Hadits yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya. Diantaranya adalah Q,S At-Taubah:105.



³M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i,2004), jilid 3, h.18
⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.169

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya, serta orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu kerjakan.”

Maksud dari Q.S At-Taubah: 105 adalah ayat ini ancaman dari Allah bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya, maka amal perbuatan mereka akan ditampakkan kepada Allah, Rasul dan kepada orang-orang yang beriman.⁵ Berdasarkan ayat al-Qur’an itu Allah swt. secara tegas memerintahkan kita untuk melakukan kerja usaha di dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang bebas memilih usaha apa saja dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan yang Allah swt. tetapkan.

Salah satu bentuk perwujudan sistem ekonomi syariah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.⁶ Dengan mengacu pada hukum Islam serta pemahaman tentang keharaman riba menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam melakukan pengelolaan keuangan umat. Hal ini berlandaskan kepada firman Allah swt. pada Q.S Al-Baqarah:275, sebagai berikut:



⁵M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i,2004), jilid 4, h.202

⁶Akhmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 113

“..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Maksud dari potongan ayat 275 pada Q.S Al-Baqarah merupakan bagian dari kesempurnaan kalam sebagai penolakan terhadap apa yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui perbedaan hukum yang ditetapkan Allah. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah. Dia yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemashalahatan persoalan. Apa yang bermanfaat untuk hamba-Nya maka Dia akan membolehkan dan apa yang membahayakan untuk hamba-Nya maka Dia akan melarangnya.⁷

Secara umum Bank adalah “*Banks create money when they make loans; money vanishes when bank loans are repaid. New money is created when banks buy government bonds from the public; money disappears when banks sell government bonds to the public. Banks balance profitability and safety in determining their mix of earning assets and highly liquid assets. Banks borrow and lend temporary excess reserves on an overnight basis in the Federal funds market; the interest rate on the these loans is the Federal funds rate*”.⁸

Sedangkan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk

⁷M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i,2004), jilid 1, h.547

⁸Campbell R. McConnell, *Economics: principles, problems and policies*, (United States: Von Hoffmann Press,2002) h.274

penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.⁹

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *mashlahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*) dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. yang *shiddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathanah*. Dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.

Bank syariah memiliki produk-produk yang sangat bervariasi. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana (pembiayaan) dan produk jasa.

Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, jika pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan

⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.30

penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli; pembiayaan dengan prinsip sewa; pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap.¹⁰

Selain itu pembiayaan juga sangat penting bagi masyarakat, antara lain yaitu masyarakat yang ingin memiliki rumah tetapi tidak mempunyai dana yang cukup, maka tinggal mengajukan pembiayaan kredit kepemilikan rumah kepada salah satu bank syariah dan juga masyarakat yang telah menjalankan kegiatan usahanya yang berstatus dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tetapi tidak mempunyai dana lagi untuk mengembangkan usahanya tersebut maka dia harus mengajukan pembiayaan kepada salah satu bank syariah terkait untuk perkembangan usaha dan lain sebagainya.

Sering dikatakan bahwa sektor perbankan, swasta maupun pemerintah (Badan Usaha Milik Negara; BUMN) termasuk pihak yang sangat penting membantu perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia.¹¹ Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 7 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Mengingat bahwa UMKM memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.¹²

¹⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008) h.97

¹¹Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia:isu-isu penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012) h. 136

¹²*Ibid.*, h. 1

Peran perbankan tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga sekaligus memberikan pembinaan, misalnya dalam desain, proses produksi dan pemasaran bagi UMKM yang mendapatkan pembiayaan bank. Peran perbankan ini sudah lama disadari oleh pemerintah sejak awal pemerintahan orde baru sampai sekarang. Hal tersebut tercerminkan oleh skema pembiayaan yang masih dijalankan dan yang terakhir sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR.

KUR adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.¹³ Tujuan akhir diluncurkan program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

KUR telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 5 November 2007. Peluncuran KUR merupakan upaya pemerintah dalam mendorong sektor perbankan menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dan koperasi, dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT. Askrido dan perum Jamkrindo.¹⁴ Bank pelaksana KUR adalah bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bukopin, BSM dan BNI Syariah.

¹³<http://www.komite-kur.com>. Artikel di akses pada tanggal 01 Mei 2013 06.25 WITA bertempat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

¹⁴Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012) h. 175

Bank syariah milik pemerintah yang menjadi bank pelaksana KUR adalah BSM dan BNI Syariah. Bank Syariah Mandiri (BSM) resmi beroperasi pada hari senin, 25 Rajab 1420 H atau tanggal 01 November 1999. PT. BSM tumbuh menjadi bank yang memadukan 2 konsep perbankan, yaitu idealisme usaha dan nilai rohani.¹⁵

BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT.BNI Persero,Tbk. Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT. Bank BNI Syariah.¹⁶

Adapun perkembangan realisasi penyaluran KUR oleh bank-bank penyalur di Indonesia dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

¹⁵ Bank Syariah Mandiri, Awal Mula dan Sejarah Panjangnya. <http://www.teropongbisnis.com/teropong-perbankan/info-layanan-bank/bank-syariah-mandiri-awal-mula-dan-sejarah-panjangnya/>. Artikel di akses pada tanggal 5 maret 13.04 WITA, bertempat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

¹⁶Bank BNI Syariah. http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BNI_Syariah. artikel di akses pada tanggal 4 maret 15.40 WITA , bertempat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Tabel 1. 1

Realisasi dan NPL penyaluran KUR periode November 2007 – Juni 2013

No	BANK	Plafon (Rp Juta)	Outstanding (Rp Juta)	Debitur	Rata-rata kredit (Rp Juta/ debitur)	NPL (%)
1	BNI	13.915.044	4.767.707	221.718	62,8	7,7
2	BRI (KUR Ritel)	14.851.235	6.214.686	89.434	166,1	3,4
	BRI (KUR Mikro)	58.242.465	17.753.347	8.132.842	7,2	1,8
3	Bank Mandiri	12.161.924	6.256.433	237.605	51,2	3,4
4	BTN	3.823.016	2.094.879	21.752	175,8	6,8
5	BUKOPIN	1.734.412	728.510	11.574	149,9	4,3
6	BSM	3.262.480	1.843.382	44.826	72,8	7,1
7	BNI Syariah	121.446	88.698	880	138,0	3,7
8	BPD	11.447.062	5.633.839	146.048	78,4	7,3

Sumber: Data Komite Kredit Usaha Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, November 2007 – Juni 2013

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah penyaluran KUR sampai bulan Juni 2013 ini, bank BUMN yang menyalurkan KUR yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah(BNI Syariah) dan BPD. Tingkat penyaluran KUR dari yang terbesar yaitu BRI; BNI; Bank Mandiri; BPD; BTN; BSM; Bukopin dan BNI Syariah.

Adapun bank pelaksana KUR yang ada di Kalimantan Selatan adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Kal-Sel,

Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Data KUR bank penyalur di provinsi Kalimantan Selatan periode Desember 2010 sampai dengan periode Juni 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Data KUR bank penyalur di provinsi Kalimantan Selatan periode Desember 2010 sampai dengan periode Juni 2013

No	Bank Penyalur	Plafon (Rp)	Debitur
1	Bank KUR Mikro	1.219.260.000.000	146.592
	BRI KUR Ritel	480.069.000.000	2.560
	Bank BRI	1.699.329.000.000	149.152
2	Bank Mandiri	628.797.000.000	7.708
3	Bank Kal-Sel	277.586.000.000	3.140
4	Bank BNI	164.070.000.000	922
5	Bank BTN	78.542.000.000	609
6	Bank Bukopin	9.690.000.000	39
7	Bank BNI Syariah	9.379.000.000	37
8	Bank Syariah Mandiri	5.215.000.000	27
	TOTAL	2.872.608.000.000	161.634

Sumber: Data Menko Perekonomian. Bank Indonesia. Desember 2010 – Juni 2013

Dari kedua data diatas yaitu data penyalur KUR diseluruh Indonesia dan khususnya data penyalur KUR di Kalimantan-Selatan, terlihat jelas bahwa penyalur KUR yang paling besar di dominasi oleh bank-bank konvensional.

Sedangkan bank yang berbasis syariah yaitu bank BNI Syariah dan BSM berada diperingkat terbawah dalam jumlah penyaluran dana dan jumlah debitur

untuk KUR atau pembiayaan untuk usaha yang bergerak dibidang usaha mikro, kecil dan menengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian untuk menganalisa lebih lanjut tentang penyaluran KUR pada bank syariah yang akan penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **”TINGKAT PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK SYARIAH DI BANJARMASIN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme dan tingkat pembiayaan KUR pada Bank Syariah di Banjarmasin?
2. Apa saja kendala dalam penyaluran KUR dan prospek Bank Syariah di Banjarmasin dalam rangka meningkatkan pembiayaan KUR

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana mekanisme dan tingkat pembiayaan KUR pada Bank Syariah di Banjarmasin.
2. Apa saja kendala dalam penyaluran KUR dan prospek Bank Syariah di Banjarmasin dalam rangka meningkatkan pembiayaan KUR

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Bahan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perbankan Syariah.
 - b. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
 - c. Bahan informasi bagi yang berminat untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai kajian yang serupa dan dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak perbankan dalam meningkatkan penyaluran KUR untuk UMKM.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan dikhawatirkan keluar dari tujuan yang sebenarnya, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Tingkat adalah tinggi rendah kedudukan; pangkat; derajat.¹⁷

Penyaluran adalah proses; cara; perbuatan menyalurkan.¹⁸

Tingkat penyaluran dalam penelitian ini maksudnya seberapa besar jumlah penyaluran KUR dan jumlah debitur pada Bank Syariah di kota Banjarmasin.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.
3. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹⁹

Bank syariah dalam penelitian ini adalah bank syariah pelaksana KUR yaitu bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

¹⁷Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), h.1197

¹⁸*Ibid.*, h.986

¹⁹Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2010) h.61

Dari definisi operasional diatas dapat disimpulkan bahwa maksud “Tingkat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah di Banjarmasin” dalam penelitian ini adalah seberapa besar jumlah penyaluran dana dan jumlah nasabah untuk pembiayaan KUR yang diperuntukkan bagi UMKM oleh Bank Syariah di kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang diantaranya bisa disebutkan sebagai berikut:

Tabel 1.3

Kajian Pustaka

No	Identitas Penelitian	Pembahasan	Temuan
1	<p>Peneliti: M. Zahid Husin (1131161224) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2014</p> <p>Judul: Implementasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin</p>	Implementasi Kredit Usaha Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme penyaluran KUR pada bank BRI kebanyakan adalah untuk kredit modal usaha. - Implementasi KUR pada bank BRI sebagian besar untuk usaha kecil dengan besar pinjaman antara Rp 5.000.000,- hingga Rp 15.000.000,- - Kendala KUR pada bank BRI adalah masih banyak masyarakat yang kurang

			memahami adanya KUR
2	<p>Peneliti: Nurul Wardhani (E0006026) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010</p> <p>Judul: Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI unit Kuwarasan cabang Gombang</p>	Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pemberian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap permohonan kredit; tahap peninjauan dan tahap pemeriksaan; tahap pemberian putusan dan tahap pencairan kredit/akad kredit. - Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian KUR pada bank BRI adalah kredit bermasalah; ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dengan kreditur dan menurunnya jumlah peminat KUR pada tahun 2009.
3	<p>Peneliti: Jum'atul Alia Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2010</p> <p>Judul: Peranan PT. BRI KCS Banjarmasin dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat di kota Banjarmasin</p>	Peranan Bank BRI untuk meningkatkan usaha mikro masyarakat di kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Bank BRI belum mendukung secara sepenuhnya usaha mikro karena dibatasi oleh faktor kehati-hatian dan kendala lainnya seperti: keterbatasan SDM yang memahami produk dan sistem syariah; adanya agunan yang diberlakukan oleh undang-undang perbankan dan kesulitan menarik dana jika terjadi kemacetan.
4	<p>Peneliti: Carla Rizka Marantika (C2A009010) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2013</p>	Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian KUR mikro	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian KUR mikro adalah jumlah tanggungan keluarga dan omzet usaha.

	Judul: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian KUR mikro		
--	---	--	--

Sumber: Data diolah, April 2014

Berkaitan dengan hal di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah menitikberatkan pada “Tingkat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah di Banjarmasin” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan tingkat pembiayaan KUR dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam penyaluran KUR dan prospek bank syariah dalam rangka meningkatkan pembiayaan KUR. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab yang dijabarkan sebagai berikut:

Pada bab pertama dijelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam perumusan masalah yang menentukan tujuan dari penelitian. Pada bab ini juga membahas signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua landasan teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

Pada bab ketiga metode penelitian, dalam bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian yang berisi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, uraian dari penulis mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan yang di dalamnya terdiri dari jenis pendekatan, subyek, obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Pada bab keempat laporan hasil penelitian, berisi tentang gambaran umum dari BSM dan BNI Syariah. Selanjutnya berisi tentang penyajian data, diantaranya data-data yang berhubungan dengan mekanisme pembiayaan KUR, jumlah penyaluran KUR, kendala-kendala KUR lalu melakukan analisis data dan hasil analisis yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga.

Pada kelima penutup, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.